

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
PEDESAAN DI KECAMATAN SUMBERREJO BOJONEGORO**

***EFFECTIVENESS OF USE OF VILLAGE FUNDS IN RURAL ECONOMIC
DEVELOPMENT IN SUMBERREJO DISTRICT, BOJONEGORO***

Putri Agustina, Sutrisno

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No. 02, Bojonegoro 62119

putriag98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana desa dan untuk mengetahui tingkat efektifitas Penggunaan dana desa dan penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi Pedesaan di kecamatan Sumberrejo, Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Sumberrejo yang memiliki populasi sebanyak 26 Desa. Sedangkan sampel yang akan dilakukan dengan teknik pengambilan sampel secara random yaitu meliputi 3 desa diantaranya adalah desa Prayungan, Pejambon, dan Karangdowo. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang mempunyai arti bahwa deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Hasil skripsi ini ingin membuktikan dugaan sementara bahwa kebijakan dana desa dan efektifitas dana desa terhadap pembangunan ekonomi di pedesaan sumberrejo desa prayungan, karangdowo dan pejambon sudah efektif. Berdasarkan Hasil Penelitian data menunjukkan bahwa Efektifitas penggunaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan ekonomi di kecamatan sumberrejo Kabupaten Bojonegoro efektif dengan persentase desa prayungan 97% kategori efektif, 99% karangdowo kategori efektif, dan desa Pejambon 99% efektif untuk penggunaan dana desa. Sedangkan untuk dana desa dalam pembangunan ekonomi diantara lain yaitu desa Prayungan dana desa dalam pembangunan sudah dalam tahap efektif dana desa sudah digunakan untuk pembangunan ekonomi melalui pembangunan fisik desadan BUMDESA, Desa karangdowo memfokuskan pembangunan ekonomi juga sudah efektif untuk pembangunan ekonomi yang didanai dana desa teruarai dalam BUMDESA dan pembangunan fisik desa yang membuat perekonomian masyarakat desa karangdowo sudah efektif, dan desa pejambon memiliki Beberapa dana Desa yang digunakan untuk pembangunan perekonomian masyarakat yaitu BUMDESA dan pembangunan desa fisik desa dari tiga desa tersebut dana desa dalam pembangunan ekonomi saat ini sudah membantu dalam pembangunan perekonomian dan membantu etahanan ekonomi pedesaan di kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Sri Mulyani (2017) menyatakan Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Pembangunan desa yang di laksanakan di tingkat desa memiliki peran penting dan strategis dalam rangka kelangsungan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, karena di dalam pembangunan desa terkandung unsur pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang menyentuh secara langsung dalam kepentingan masyarakat yang tentunya bermukim di pedesaan dalam rangka upaya sebagai peningkatan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistim penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian desa memiliki kewenangan tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di lingkup desa tersebut atau yang di kenal dengan otonomi desa.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Dana desa saat ini harus mulai ter arah sehingga kita sebagai masyarakat pedesaan harus mengerti sejauh mana dana desa digunakan untuk pembangunan ekonomi pedesaan sehingga penulis bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dana desa dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan ekonomi pedesaan.

Pengertian Efektifitas Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu : 1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. 3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan 4. Ketepatan dalam menentukan

pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan. 5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif. 7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut. 8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Dana Desa merupakan dana yang signifikan untuk menunjang program program dipedesaan, Di jawa timur tepatnya di kecamatan sumberrejo kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang perdesaanya menerima dana desa setiap tahunnya. Dana desa yang di transfer pemerintah pusat untuk desa-desa secara nasional bertujuan agar program dana desa dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di perdesaan kecamatan sumberrejo. Di kabupaten Bojonegoro tepatnya di 3 desa yaitu prayungan, pejambon, dan karangdowo kecamatan Sumberrejo, Sumberejo merupakan kecamatan yang perdesaanya mendapatkan anggaran dana desa dimana salah satunya adalah desa perayungan yang saat ini setiap tahunnya masih menerima dana desa. pengelolaan baik dari anggaran sampai realisasi dengan demikian kita harus

melihat Dana Desa yang di gunakan untuk menunjang program program desa seberapa efektifkan dana desa yang digunakan untuk pembangunan ekonomi pedesaan.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro”

TINJAUAN PUSTAKA

Efektifitas

Pada dasarnya arti efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering dihubungkan dengan pengertian efesien, walaupun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efesien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang akan dicapai dengan membandingkan antara input dan outputnya. pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat actual. Maka pemecahan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan, data, status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Menurut Matland (dalam Nugroho, 2010:650), berdasarkan teori implentasi kebijakan pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :

a) Tepat Kebijakan (apakah kebijakannya sudah tepat)

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellentis the policy*. Sisi pertama kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, sisi kedua adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan

(misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

b) Tepat Pelaksanaannya

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

c) Tepat Target

Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, atautakah tidak. Kedua adalah kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

d) Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait Menurut Nogroho (2010:651). Donald J. Calista menyebutnya sebagai lembaga endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista Variabel Eksogen, yang terdiri atas *public perception*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individualis, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan.

e) Tepat Proses

1) Secara umum implementasi kebijakan public terdiri atas tiga proses, yaitu: *Policy acceptance*. Dalam hal ini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlakukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

2) *Policy adaption*. Dalam hal ini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

3) *Strategic readiness*. Dalam hal ini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian

dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Dana Desa

Menurut Sri Mulyani Indrawati (2017:12) Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dalam APBN ditentukan sebesar 10% dari luar dana transfer daerah secara bertahap.

Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Tujuan Dana Desa sendiri adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Menentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengaasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Menurut Sri Mulyani Indrawati (2017:16) arah dan pokok-pokok kebijakan Dana Desa yaitu:

1. Menyempurnakan formula Pengalokasian Dana Desa, melalui:
 - a. penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula), serta
 - b. pemberian afirmasi pada desa yang tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
2. Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dengan menyalurkan secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektifitas pemantauan dan evaluasi.
4. Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan insfrastuktur dasar,serta memperluas kesempatan kerja.

Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.

Menurut Elin Dwi (2019:6) Pembangunan Desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanankeamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan.

Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa : Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengembangkan program unggulan berdasar tiga (3) pendekatan yang disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia,

yakni: (i) Jaring Komunitas Wiradesa; (ii) Lumbung Ekonomi Desa; dan (iii) Lingkar Budaya Desa. Melalui tiga (3) pilar tersebut diharapkan arah pengembangan program prioritas untuk menguatkan langkah bagi kemajuan dan kemandirian Desa, yang juga mampu dikembangkan sebagai daya lenting dalam peningkatan kesejahteraan kehidupan Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini berusaha mencari jawaban efektifitas Dana desa anggaran 2015-2019 pada kriteria Efektif terhadap Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan dan dari berbagai lembaga atau instansi terkait seperti, Kantor Desa di kecamatan sumberrejo ataupun data-data yang diperoleh dari berbagai sumber lainnya yang relevan.

Teknik Analisa Data

Analisis data ada tahap-tahap yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Membuat Tabel Realisasi Dana Desa dan Target Dana Desa tahun 2015 sampai dengan 2019.
2. Mengevaluasi Realisasi Dana Desa di tiga desa di Kecamatan sumberrejo yaitu Desa Prayungan, Pejambon, dan Karangdowo
 - a) Identifikasi target dan realisasi dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi dengan target (anggaran) yang telah ditetapkan.
 - b) vektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

berdasarkan potensi nilai rill (Abbdul Halim,2010). Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan Desa Lembean/Depdagri, Kemendagri no 690.900.327).

$$\text{Efektifitas Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Target Dana Desa}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut :

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kreteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1

Kriteria Rasio Efektivitas

Perentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efktif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Nur Riza Utiahman1, Ee N. Walengko2, Hanlyy F. dj. Siwu3, 2016

Menjabarkan Efektifitas Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi Pedesaan melalui wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sumberrejo

Berdasarkan hasil penelitian selama dua bulan diperoleh data efektivitas dana desa di kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut

Tabel 2

Target dan Realisasi Dana Desa tahun 2015-2019

No	Tahun	Desa Prayungan		Desa Pejambon		Karangdowo	
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	2015	272.417.700	300.000.000	276.255.200	276.255.200	274.897.300	274.897.300
2	2016	612.091.500	612.091.500	620.159.700	620.196.700	617.304.700	618.497.520
3	2017	765.947.000	779.430.200	789.675.000	789.675.900	786.050.400	786.050.400
4	2018	682.680.400	684.153.400	692.243.400	692.243.400	710.998.900	710.998.900
5	2019	746.018.100	771.018.100	783.009.100	783.009.100	810.294.100	810.294.100

Sumber : Kantor Desa rayungan, Pejambon, dan karangdowo

Data-data yang tertera pada tabel diatas (target dan realisasi Dana) dan cara perhitungan analisanya sebagai berikut.

No	Tahun	Presentase Realisasi	Kriteria
1.	2015	100%	Efektif
2.	2016	99%	Efektif
3.	2017	99%	Efektif
4.	2018	100%	Efektif
5.	2019	100%	Efektif
Jumlah		99%	Efektif

Untuk mengetahui Efektivitas menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Efektivitas Dana Desa}}{\text{Realisasi Dana Desa}} \times 100\% =$$

Tabel 3

Persentase Efektivitas Dana Desa Prayungan
Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Presentase Realisasi	Kriteria
1.	2015	91%	Efektif
2.	2016	100%	Efektif
3.	2017	98%	Efektif
4.	2018	100%	Efektif
5.	2019	97%	Efektif
Jumlah		97%	Efektif

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 tingkat efektivitas penerimaan Dana Desa Prayungan dari tahun 2015 sampai 2019 adalah sebesar 97% yang di kategorikan efektif.

Tabel 4

Persentase Efektivitas Dana Desa Pejambon
Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Presentase Realisasi	Kriteria
1.	2015	100%	Efektif
2.	2016	99%	Efektif
3.	2017	100%	Efektif
4.	2018	100%	Efektif
5.	2019	100%	Efektif
Jumlah		99%	Efektif

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 tingkat efektivitas penerimaan Dana Desa Pejambon dari tahun 2015 sampai 2019 adalah sebesar 99% yang di kategorikan Efektif.

Tabel 5

Persentase Efektivitas Dana Desa Karangdowo
Tahun 2015 - 2019

No	Nama Desa	Tahun					Jumlah	Rasio Efektifitas
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Prayungan	91%	100%	98%	100%	97%	97%	Efektif
2	Pejambon	100%	99%	99%	100%	100%	99%	Efektif
3	Karangdowo	100%	99%	100%	100%	100%	99%	Efektif

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 tingkat efektivitas penerimaan Dana Desa Karangdowodari tahun 2015 sampai 2019 efektif.

Hasil dari Efektifitas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sumberrejo berdasarkan tabel 3,4 dan 5 yaitu :

a. Ketahanan Ekonomi Desa Prayungan

1. Keragaman Produksi Masyarakat Desa yang dimana Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk di desa prayungan yaitu Pertanian,perikanan ,industri perdagangan, yang dimana dari keragaman produksi masyarakat pertanian Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi sedangkan musim Kemarau terkadang ditanami Tembakau dan palawija. Lahan Pekarangan ditanami macam-macam tanaman kecil seperti sayuran, Buah dan lainnya. Pertanian merupakan salah satu yang di bantu oleh dana desa terutama dalam pembangunan irigasi untuk pengairan
2. Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen), sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)

- Didesa prayungan sangat dekat dengan pusat perdagangan yang dimana sektor perdagangan di pemukiman warga sangat terjangkau dan membuat perputaran uang sangat pesat berputar.
3. Akses Distribusi/Logistik yang Terdapat kantor pos dan jasa logistik di desa prayungan tidak terdapat kantor pos tetapi kantor pos terdapat di pusat kota sumberrejo yang tidak berada pada desa prayungan akan tetapi pusat logistik dan distribusi sangat dekat dengan masyarakat desa prayungan
 4. Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan
Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta), Tersedianya BPR dan Akses penduduk ke kredit yang dimana semua indikator di atas tidak terdapat di desa prayungan tetapi berada di pusat desa sumbberejo. beberapa diantaranya adalah Bank mandiri, Bank BNI, Bank Jatim, Bank Btpn, Bank BRI 1, Bank BRI 2, BRI unit Margomuly, BPR Rajekwesi, Danamon, Bank Pasar, BPR lohjinawe, BPR mitra usaha dan lain-lain. Sehingga seluruhnya terpenuhi karena desa prayungan sangat dekat dengan pusat kota sumberrejoyang memiliki banyak Bank pengkreditan Rakyat.
 5. Lembaga Ekonomi
Tersedianya BUMDESA Prayungan yang bernama BANGKIT SEJAHTERA Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dimana dana desa ikut berperanan dalam penyertaan modal
 6. Keterbukaan Wilayah
Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum) di desa prayungan tidak terdapat moda transportasi umum karena desa prayungan dekat dengan pusat keramaian kota yaitu pasar sumberrejo, desa prayungan memiliki jalan yang seluruhnya sudah memenuhi syarat Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Kualitas Jalan Desa prayungan sudah seluruhnya berpaving dimana dana desa ikut berperan didalamnya.
 - b. ketahanan Ekonomi Desa Karangdowo
 1. Keragaman Produksi Masyarakat Desa yang dimanapun Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk yaitu pabrik, berdagang, petani, usaha dana desa juga memengaruhi sektor usaha rumahan seperti usaha mebel di desa karangdowo, pertanian di desa arangdowo sendiri jika musim penghujan menanam padi dan jika musim kemarau menanam palawija di desa karangdowo mempunyai BUMDESA yang mendanai kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi yang akan di jelaskan di point kelembagaan ekonomi.
 2. Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan
Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan dari point di atas desa karangdowo merupakan desa yang dekat dengan pusat pelayanan perdagangan karena di desa karangdowo sendiri sudah

terdapat pertokoan baik semi permanen maupun permanen tetapi di desa karangdowo tidak memiliki hotel ataupun penginapan dan restoran, penginapan dan hotel terdapat di pusat kota sumbberejo.

3. Akses Distribusi/Logistik yang Terdapat kantor pos dan jasa logistik di desa karangdowo belum terdapat kantor pos tetapi kantor pos terdapat di pusat kota sumberrejo yang tidak berada pada desa karangdowo akan tetapi pusat logistik dan distribusi sangat dekat dengan masyarakat desa karangdowo.

4. Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan

Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)

Tersedianya BPR dan Akses penduduk ke kredit dimana semua indikator di atas tidak terdapat di desa karangdowo tetapi berada di pusat desa sumbberejo beberapa diantaranya adalah Bank mandiri, Bank BNI, Bank Jatim, Bank Btpn, Bank BRI 1, Bank BRI 2, BRI unit Margomuly, BPR Rajekwesi, Danamon, Bank Pasar, BPR lohjinawe, BPR mitra usaha dan lain-lain. desa karangdowo sangat dekat dengan pusat kota sumberrejo sehingga keadaan tersebut desa sendiri langsung datang ke pusat keramaian desa sumbberejo

5. Lembaga Ekonomi

Tersedianya lembaga ekonomi masyarakat di desa Karangdowo yaitu BUMDES yang bernama “BINTANG SEJAHTERA” yang dimana Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa

dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang di fokuskan pada Peminjaman Modal Kepada para Pedagang terutama pedagang kecil yang terdapat pada desa karangdowo yang di Danai oleh Dana Desa.

6. Keterbukaan Wilayah

Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum) desa karangdowo sangat jauh dengan jalan raya sekitar 3km angkutan umum berada pada pusat sumberrejo yang tidak jauh dengan desa karangdowo Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan Kualitas Jalan Desa karangdowo yang seluruhnya sudah terpavingisasi yang di Danai oleh Dana Desa

- c. Ketahanan Ekonomi Desa Pejambon

Keragaman Produksi

1. Masyarakat Desa yang dimanan Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk yaitu petani, pedagang dan perternakan juga terdapat di desa pejambon yang dimana pertanian dan pedagang menjadi salah satu hal yang saat ini sangat mencolok di desa pejambon karena kegiatan tersebut juga di danai oleh dana desa untuk penguatan ekonomi masyarakat desa pejambon. pertanian Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi sedangkan musim Kemarau terkadang ditanami palawija.

2. Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan desa pejambon memiliki semua

indikator di atas kecuali hotel dan penginapan salah satunya kedai makanan sudah terdapat di desa pejambon yang dimana desa pejambon sendiri menyediakan aset warung yang di danai dana desaguna pendapatan asli desa dan akses penduduk ke pusat kota lumayan berjarak dekat karena kases jalan menuju pusat kota sudahlah cukup memadai.

3. Akses Distribusi/Logistik yang Terdapat kantor pos dan jasa logistik di desa pejambon belum terdapat kantor pos tetapi kantor pos terdapat di pusat kota sumberrejo yang tidak berada pada desa pejambon akan tetapi pusat logistik dan distribusi sangat dekat dengan masyarakat desa Pejambon.
4. Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan
Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)
Tersedianya BPR dan Akses penduduk ke kredit dimana semua beberapa diantaranya adalah Bank mandiri, Bank BNI, Bank Jatim, Bank Btpn, Bank BRI 1, Bank BRI 2, BRI unit Margomuly, BPR Rajekwesi, Danamon, Bank Pasar, BPR lohjinawe, BPR mitra usaha dan lain-lain. indikator di atas tidak terdapat di desa Pejambon tetapi berada di pusat desa sumbberejo yang seluruhnya terpenuhi karena desa pejambon sangat dekat dengan pusat kota sumberrejo.
5. Lembaga Ekonomi
Tersedianya lembaga ekonomi masyarakat di desa Pejambon yaitu BUMDES yang bernama “SARANA MANDIRI” yang

dimana Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang berjalan pada program pembayaran listrik, wifi murah, aset toko dan penyertaan yang dimana Bumdesa sangat perbengaruh untuk ekonomi di desa pejambon dengan demikian adana desa juga berperan dalam kegiatan bumdesa tersebut.

6. Keterbukaan Wilayah

Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum) desa karangdowo sangat jauh dengan jalan raya sekitar 6m angkutan umum berada pada pusat sumberrejo yang tidak jauh dengan desa pejambon Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan Kualitas Jalan Desa pejambon yang seluruhnya sudah terpavingisasi yang di Danai oleh Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian data menunjukan bahwa Efektifitas penggunaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan ekonomi di kecamatan sumberrejo Kabupaten Bojonegoro efektif dengan peresentase desa prayungan 97% tekategori efektif , 99% karangdowo terkategori efektif, dan desa Pejambon 99% efektif untuk penggunaan dana desa. lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah yang di semua dimensi diatas sudah ditemukan yang hanya di danai dana desa hanya 4 dimensi saja ,jadi dari semua Indikator ketahanan ekonomi di 3 desa yaitu pejambon, prayungan dan karangdowo tersebut hanya terdapat 4 dimensi yang dalam pembangunan ekonomi di danai dana desa.

SARAN

Dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa Efektifitas penggunaan dana desa dalam

pembangunan ekonomi pedesaan di sumbberejo sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh cukup baik, maka dapat ditemukan saran bahwa Pemerintah desa di kecamatan Sumbberejo diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada untuk pengembangan pembangunan ekonomi melalui dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang telah di tetapkan tiap tahunnya. Yang perlu di tambahkan juga adalah dimana di setiap desa masih terdapat kekurangan yaitu indikator ketahanan ekonomi dengan dimensi Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan, Akses Distribusi/Logistik dan Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan untuk melengkapi dalam pembangunan ekonomi pedesaan di kecamatan sumbberejo bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Subandi. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: ALFABETA.
- Sutrisno. 2019. *Jurnal Ekonomi Managemen dan Sosial*. Bojonegoro: ALFABETA
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA
- Debby ChRotinsullu, Een N. Walewangko. 2018. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keungan Daerah* Vol 19 No. 06. Minahasa: ALFABETA
- Kemendes. 2019. *Artikel Pengumuman*. Jakarta: ALFABETA
- Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah. 2017. *Jurnal AgriSosio Ekonomi Unsrat* Vol 13 No2A :335 - 342 ISSN 1907– 429. Minahasa: ALFABETA
- Hamidi Hamidal. 2015. *Indeks Desa Membangun*. jakarta selatan: ALFABETA